PERLINDUNGAN HAKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DI ERA PASAR BEBAS: PENDEKATAN KEPUSTAKAAN

Enni Sopia Siregar^{1)*}, Lilys Sinurat²⁾

¹⁾ Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: ennisopia@gmail.com

²⁾ Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: lilyssinuratt@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum Indonesia terhadap HaKI di era pasar bebas. Iklim persaingan usaha yang sehat dan didukung oleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam dunia usaha akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang ke depannya. Semakin banyak HaKI dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia maka akan sangat mendukung potensi peningkatan dunia usaha yang lebih baik dalam persaingannya di era pasar bebas. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana penulisan hukum ini merupakan atau menggambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Semua data yang terkumpul dalam penelitian ini bersifat sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang menggunakan penjelasan berupa kumpulan kata / uraian dengan prosedur teoritis serta perkiraan yang logis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, HaKI, Pasar Bebas.

PENDAHULUAN

Dunia usaha dalam perkembangannya tidak terlepas dari hukum HaKi. Dunia usaha membutuhkan perlindungan akan produknya dan apa saja yang berkaitan dengan produknya, misalnya merek dari sebuah produk, desain sebuah produk, dan lain sebagainya, yang perlu dilindungi agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain demi keuntungannya sendiri dan merugikan pemilik hak tersebut.

Kemajuan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari banyaknya perlindungan HaKi yang dimilikinya. Implementasi perlindungan HaKi di Indonesia banyak menemui kendala yang disebabkan oleh berbedanya karakter budaya masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dengan karakter dari rezim HaKi yang bersifat individual. Untuk itu perlu adanya perlindungan dan perbaikan dalam rezim HaKi yang ada di Indonesia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sehingga, apabila rezim HaKi yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, maka akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan.

Dari uraian di atas terdapat beberapa hal yang perlu dikaji yaitu bagaimana peran hukum HaKi kaitannya dengan hukum persaingan usaha?. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan HaKi di Indonesia ?. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut agar perlindungan HaKi dapat menjadi jalan untuk peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia di era pasar bebas.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian HaKi

Istilah HaKi atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

HaKi atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKi adalah hak untuk menikmati secara

ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKi adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKi harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKi. Tujuan dari penerapan HaKi yang Pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HaKi milik pihak lain, Kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

Menurut Nia Kurniati dkk, Teori yang mendasari perlunya perlindungan hukum terhadap HKI adalah sebagai berikut:

1. Teori Reward memiliki makna mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta/pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif nya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut;
2. Recovery theory, menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektual nya harus memperoleh kembali apa yang ditelak dikeluarkannya tersebut;
3. Incenve theory, mengaitkan pengembangan kreatifitas dengan memberikan insentif pada penemu/pencipta/pendesain tersebut;
4. Risk theory, mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut; dan
5. Economic Growth Smulus Theory, yang mengakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi.

Dalam hal ini beberapa alternatif yang dapat dijadikan pedoman dalam perlindungan HKI yaitu perlindungan hukum merek baik secara konvensional atau perlindungan hukum

merek secara kolektif, dan juga perlindungan hukum berdasarkan indikasi geografis.

B. Macam-Macam HaKI

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
3. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
4. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan

Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
3. Tidak memerlukan pendaftaran

Syarat Hak Cipta

1. Fiksasi diwujudkan dalam format yang nyata.
2. Orisinal karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
3. Kreativitas minimal tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam ciptaan itu

2. Hak Kekayaan Industri yang Meliputi

Paten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa : Proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Peraturan Perundang-undangan tentang Paten UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten No 13 Tahun 2016 ini yaitu:

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan tau dikenal.
2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.
3. Objek perlindungan paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri.

4. PNS/ASN bisa sebagai pemegang paten (co-pemohon).
5. Dimungkinkan untuk pemeriksa di luar pemeriksa karir (pemeriksa ad hoc) dalam membantu pemeriksaan substantif.
6. Mekanisme pemeriksaan post grant.
7. Percepatan pemeriksaan substantif.

Jenis Paten

a. Paten Sederhana

1. Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat baru dan *industrial applicable*
2. Satu klaim mandiri untuk satu Invensi
3. 10 tahun

b. Paten Biasa

1. Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan) serta harus memenuhi ketiga syarat paten.
2. 20 Tahun

Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan, yang pertama merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Karakteristik Merek

1. Perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang.
2. Tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan perlindungan.
3. Tidak melanggar kesusilaan .
4. Tidak menggunakan kata yang generic.
5. Perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang

Fungsi Merek

1. Sebagai daya pembeda dengan produk lain.
2. Sebagai jaminan mutu produk
3. Saran promosi untuk dikenal masyarakat
4. Menunjukkan asal-usul barang

Desain Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Karakteristik Desain Industri

1. Perlindungan selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang.
2. Dapat mempengaruhi psikologis pembeli
3. Meningkatkan nilai jual
4. Sarana kompetis

Syarat Desain Industri

1. Memiliki unsur kebaruan.
2. Memiliki nilai estetika.
3. Kreasi suatu desain dapat dilihat baik dengan kasat mata maupun menggunakan alat bantu.

4. Dapat diproduksi secara masal baik dengan mesin maupun tangan sepanjang jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Rahasia Dagang

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang bahwa, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Perlindungan Rahasia Dagang

Perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia terjaga. Jadi, jangka waktunya tidak bisa dipastikan lama atau cepat. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Hak Pemilik (pemegang) Rahasia Dagang

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

1. Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
2. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan
3. Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 Tentang Merek bahwa, Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau

kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

C. Prinsip-Prinsip HaKI

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana penulisan hukum ini merupakan atau menggambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Contohnya adalah seperti laporan hasil penelitian, disertasi, jurnal, artikel, mengenai hak atas kekayaan intelektual.

Dalam penelitian ini, semua data yang terkumpul dalam penelitian ini bersifat sekunder

akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang menggunakan penjelasan berupa kumpulan kata / uraian dengan prosedur teoritis serta perkiraan yang logis. Menurut Umar (2000:38) menyebutkan “tujuan penelitian kualitatif adalah memaparkan atau mendeskripsikan hal – hal yang berhubungan dengan objek penelitian”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum HaKI kaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha

Hukum dalam bidang kekayaan intelektual ini meliputi hak komunal dan hak personal. Perlindungan yang dilakukan pada kedua hak tersebut masih banyak mengalami kendala. Hal tersebut perlu adanya perhatian yang serius dari pemerintah beserta para pemangku kepentingan dan harus ada solusi nyata yang harus dilakukan. Perlu adanya terobosan dalam bidang hukum untuk dapat memproteksi perekonomian Indonesia yang salah satunya melalui perlindungan kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat. Hukum dalam bidang kekayaan intelektual dengan hukum persaingan usaha ini merupakan komplementer, melengkapi atau saling mengisi Perkembangan pasar bebas tanpa disadari secara langsung telah memberikan peluang dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Peluang itu adalah peluang untuk berlomba-lomba memperdagangkan barang dan jasa yang dihasilkan, melampaui batas wilayah suatu negara secara lebih cepat, lebih mudah, dan dengan harga yang sangat murah. Sehingga dapat menghasilkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. HaKI merupakan fundamental perekonomian suatu bangsa.

Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa banyak HKI yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Semakin banyak HaKI yang dimiliki, semakin cepat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai Negara tersebut. HaKI yang dimiliki dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa.

Sehingga dengan semakin banyaknya HKI yang dimiliki suatu bangsa dapat dijadikan sebagai pemacu perkembangan ekonomi dan

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dari dalam negeri tersebut.

Menurut Shahid Ali Khan, penerapan sistem HaKI merupakan batu loncatan dari sistem ekonomi modern di tingkat nasional dan sekaligus merupakan katalisator pembangunan. Selain itu, HaKI merupakan asset untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas. Peran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam persaingan usaha di Indonesia tidak dapat dikesampingkan begitu saja keberadaannya. Keberadaan rezim hukum HaKI dan Hukum Persaingan Usaha hendaknya dipandang sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreatifitas serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Secara faktual, HaKI merupakan satu sistem pemberian perlindungan hukum bagi karya-karya intelektual yang mencakup jangkauan yang luas, dari pengetahuan tradisional sampai program komputer dan Internet di era bisnis digital saat ini. HaKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis, karena adanya potensi keuntungan ekonomis.

Hak Atas Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Keunggulan komparatif sangat bergantung kepada kemampuan teknologinya, salah satu unsurnya adalah pada bidang cakupan kekayaan intelektual. Jadi, kekayaan intelektual menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam pergaulan internasional. HaKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Perlu adanya revitalisasi HaKI di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan dan terobosan hukum yang dapat membangkitkan kesadaran

masyarakat akan HaKI dan mengeluarkan kebijakan agar masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan perlindungan hasil dari kekayaan intelektualnya dapat terlindungi dengan baik dan penegakan Hukum HaKI menjadi lebih efektif. Semakin banyaknya kekayaan intelektual masyarakat Indonesia yang terlindungi, maka akan dapat mendorong laju perekonomian Indonesia di era pasar bebas. Selain itu, perlu dorongan dari iklim persaingan usaha yang sehat yang diciptakan oleh penegakan hukum persaingan usaha yang optimal dan berkeadilan, sehingga perekonomian Indonesia semakin kuat.

1. Hambatan Penerapan HKI di Indonesia

Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang tidak mudah dalam menerapkan rezim HKI. Sebab, Indonesia mempunyai kekhasan dalam karakteristik masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individu, meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak - haknya. Seperti halnya kebiasaan tolong menolong merupakan salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat lokal seperti di Indonesia. Bila dikaitkan dengan penerapan HaKI di Indonesia. Ciri dari masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan isu tentang perlindungan atas kepentingan ekonomi individu pemilik hak dalam sistem HaKI. Masyarakat lokal banyak yang tidak peduli terhadap upaya perlindungan HaKI. HaKI bersifat individualistik dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang sangat menghargai kebersamaan. Keduanya saling bertentangan, sehingga penerapan HaKI di Indonesia banyak mendapatkan kendala. Konsep HaKI yang dibawa di Indonesia kurang pas terhadap budaya yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk membentuk perundang-undangan yang sesuai dengan budaya komunal yang ada di Indonesia.

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan HaKI di Indonesia cukup bervariasi, tergantung pada jenis perlindungannya. Rezim HKI tidak dapat melindungi pengetahuan tradisional. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Sardjono, bahwa HaKI adalah sebuah rezim yang sama sekali berbeda dengan karakteristik dari pengetahuan tradisional. HaKI adalah rezim individualistik untuk memonopoli teknologi

guna melindungi investasi (modal). HaKI tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pemilik modal. Seperti misalnya teknologi obat-obatan. Karakter HaKI yang demikian jelas tidak memungkinkan untuk diaplikasikan pada sistem perlindungan teknologi obat-obatan tradisional (traditional medicinal knowledge) yang mempunyai karakter yang sangat berbeda dari teknologi farmasi modern yang dikembangkan kaum kapitalis farmasi dunia. Indonesia sendiri sudah memiliki rezim perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang berbentuk folklore, seperti yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, ketentuan pasal tersebut masih sulit untuk diimplementasikan. Salah satu alasannya adalah bahwa pasal tersebut memerlukan peraturan pelaksanaan yang sampai saat ini belum diterbitkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala penerapan HaKI di Indonesia adalah pada peraturan perundang-undangan yang belum lengkap.

Dalam mendapatkan perlindungan HaKI terkadang prosedurnya terlampau rumit. Sebagai contoh prosedur paten. Masyarakat lokal pada umumnya masih banyak yang tidak memahami bagaimana prosedur atau tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh hak paten. Pada Pasal 24 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menjelaskan bahwa permohonan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan harus memuat: (a) tanggal, bulan, dan tahun permohonan, (b) alamat lengkap dan alamat jelas pemohon, (c) nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor, (d) nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Pemohon diajukan melalui Kuasa, (e) surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa, (f) pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten, (g) judul Invensi, (h) klaim yang terkandung dalam Invensi, (i) deskripsi tentang Invensi, yang Secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi, (j) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan, (k) untuk memperjelas Invensi, dan (l) abstrak Invensi. Syarat yang tertuang dalam Pasal 24 Undang-Undang Paten tersebut tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat lokal yang akan melakukan klaim perlindungan bagi pengetahuan obat-obatan tradisional.

Hambatan lain yang berhubungan dengan inventor, seperti misalnya pada paten. Dalam

perlindungan paten menuntut tindakan aktif dari inventor untuk mendapatkan perlindungan. Rezim paten menuntut masyarakat berlaku aktif mengajukan permintaan perlindungan. Masyarakat lokal yang ingin meminta perlindungan paten harus melakukan berbagai langkah administratif dan sebelumnya mereka harus menyusun dokumen yang berisi spesifikasi paten serta klaim yang dikehendaki. Masyarakat lokal juga kesulitan dalam pembuatan drafting paten sebagai salah satu sarat formal pengajuan perlindungan paten yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Kantor Paten. Hal tersebut menjadi kendala paling nyata dalam mendapatkan perlindungan paten. Tradisi masyarakat lokal pada umumnya yang tidak terbiasa dengan budaya tulisan. Pola-pola perilaku anggota masyarakat tradisional di Indonesia ditentukan oleh norma-norma tradisional yang diakui dan dipatuhi yang secara umum dikenal sebagai adat. Lemahnya dukungan budaya hukum mengakibatkan tidak terpercayainya suatu efektivitas hukum. Hal ini juga menjadi hambatan dalam penerapan HaKI di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat perekonomian domestic dengan orientasi dan berdaya saing global, dilakukan upaya produktivitas nasional melalui inovasi, penguasaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan bangsa secara berkelanjutan, mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Potensi untuk mengembangkan HaKI bertumpu pada sumber daya manusia (SDM) yang memiliki bakat dan keahlian untuk berinovasi. Jika pelaku ekonomi di Indonesia kurang peduli terhadap perlindungan HaKI, maka akan sangat mempengaruhi penerapan HKI untuk bisa berjalan dengan baik. Seperti contoh yang penulis kutip dari bukunya Ansori Sinungan, hasil dari peneliti yang dilakukan sejak oktober 2006 sampai Februari 2008 bahwa fakta dilapangan menunjukkan bahwa UKM di Indonesia belum memanfaatkan UU Desain Industri. UKM belum sepenuhnya memanfaatkan perlindungan HaKi. Hal tersebut dapat menjadi salah satu bukti bahwa budaya hukum masyarakat masih kurang dalam bidang HaKI.

Faktor penghambat di atas merupakan sebagian dari banyaknya hambatan dalam penerapan HKI di Indonesia. Perlu adanya kebijakan dan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dan perlu adanya dorongan dari berbagai pihak (pemangku kepentingan) untuk dapat bersama-sama meningkatkan peran HaKI dalam membangun perekonomian bangsa Indonesia. Strategi dan Terobosan Kebijakan dalam HaKI Perlindungan dalam bidang kekayaan intelektual memang sangat penting dan dibutuhkan dalam mem-back up perekonomian Indonesia dalam perdagangan bebas saat ini. Perlu diingat bahwa perlindungan dalam bidang kekayaan intelektual di Indonesia harus meliputi dua hak yaitu hak komunal dan hak personal. Dalam perkembangannya hak personal ini dikelompokkan menjadi dua yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.

Penting mengenal karakteristik yang dimiliki masing-masing hak tersebut yaitu hak komunal dan hak personal. Dengan mengenal karakteristik dua hak tersebut maka dapat ditentukan bentuk perlindungan yang cocok bagi masing-masing hak tersebut. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual harus dilakukan sebagai upaya membangun perekonomian Indonesia. Menurut penulis, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk dapat melindungi kekayaan intelektual di Indonesia. Pertama, perlu dibentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kedua, Harus dilaksanakan pendokumentasian terhadap kekayaan intelektual Indonesia. Ketiga, peran aktif dan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk melindungi kekayaan intelektual Indonesia. Keempat, perbaikan dalam kelembagaan. Kelima, membangun budaya hukum bagi masyarakat. Perundang-undangan sebagai salah satu perangkat yang dapat digunakan dalam melindungi hak-hak warga masyarakat. Gagasan pembentukan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekayaan intelektual harus dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Mengingat bahwa budaya masyarakat Indonesia berbeda dengan budaya luar. Perlu adanya perundang-undangan yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat lokal. Bila perlu adanya amandemen guna menyesuaikan rezim HaKI dengan tuntutan global dan sekaligus aspirasi dan pandangan warga masyarakat Indonesia. Seperti yang telah diungkapkan oleh Agus Sardjono, bahwa pemerintah dapat

mempertimbangkan penyusunan perundang - undangan sui generis yang didalamnya mengatur mengenai masalah akses orang asing terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait, serta pembagian manfaat yang terjadi karena akses tersebut. Aspek budaya yang masuk dalam hak kekayaan komunal milik masyarakat tradisional perlu juga diakomodir dalam perundang-undangan. Pendokumentasian terhadap kekayaan intelektual Indonesia harus segera dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengklaim jenis-jenis hak komunal disetiap daerah, menangkalkan pendaftaran hak komunal yang dilakukan oleh orang asing, dan menyebarluaskan kemanfaatan hak komunal kepada masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan pendokumentasian ini bukan berarti tidak mengalami kendala. Akan tetapi kendala tersebut perlu ada solusi yang nyata yaitu dengan mengajak para stakeholders atau pemangku kepentingan untuk berkomitmen penuh, melakukan digitalisasi data dan membuat akses internet lewat Internet, pemberdayaan dan/atau optimalisasi keberadaan Sentra HaKI. Dalam menyelesaikan permasalahan HaKI ini perlu adanya peran aktif dari para pemangku kepentingan.

Komitmen bersama para pemangku kepentingan menjadi modal dasar dalam perubahan rezim HaKI yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Dalam buku yang ditulis oleh Sudarmanto, beliau membagi para pemangku kepentingan menjadi 4 (empat) yaitu pelaku, pelatih, promotor dan wasit. Keempat kelompok pemangku kepentingan tersebut harus bersinergi dengan baik intelektual yang ada di Indonesia. Yang dimaksud dengan pelaku adalah pendesain, penemu, pencipta, pemohon HaKI, pengrajin, masyarakat industri, pelaksana HaKI, dan lain -lain. Pelatih adalah kementerian, non kementerian, dinas, pemda terkait, perguruan tinggi dan Lembaga Penelitian, konsultan HaKI, dan lain sebagainya. Promotor terdiri dari asosiasi (kerajinan, industri dan perdagangan), kadin, pengusaha/inventor, LSM, dan lain sebagainya. Sedangkan wasitnya adalah kantor HaKI, pengadilan, mahkamah agung, polisi, dan jaksa.

Perbaiki kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan atau hambatan dalam implementasi perlindungan HaKI di Indonesia, ialah dengan melakukan kajian terhadap semua unsur dari kelembagaan, seperti legislatif,

eksekutif, dan yudikatif. Berhubungan dengan kajian terhadap semua unsur dari kelembagaan, dapat dilakukan revitalisasi sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, dan tertib administrasi untuk peningkatan pelayanan. Salah satu komponen suksesnya implementasi perlindungan HaKI tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang akan melaksanakan proses pengadministrasian permohonan pendaftaran HKI pada Ditjen HKI. Perlu adanya peningkatan etos kerja agar dapat lebih produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip good governance.

Dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan luas terhadap HKI. Selain itu, juga perlu adanya penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan yang menangani masalah perlindungan HKI dalam arti luas. Dalam rangka memperkuat kelembagaan Ditjen HKI, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah penguatan kelembagaan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maupun bantuan-bantuan internasional.

Dalam arti bahwa perlindungan HKI mencakup kekayaan komunal dan personal. Untuk mendukung itu semua perlu adanya sikap dan perilaku siap melayani mulai dari pejabat Negara dari tingkat yang paling bawah sampai pada tingkat yang paling tinggi yaitu tingkat pengambil kebijakan (decision maker) dalam jajaran pemerintahan⁴⁸ demi terciptanya suatu pelayanan publik yang baik dalam suatu Negara. Membangun budaya hukum bagi masyarakat merupakan salah satu cara untuk dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya HaKI di era pasar bebas mendatang. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum (legal culture) adalah unsur yang utama dapatnya suatu sistem hukum berjalan. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, pandangan, nilai, idea dan pengharapan-pengharapan mereka terhadap hukum. Perlu adanya sosialisasi dalam bidang HaKI yang dilakukan secara menyeluruh diberbagai kalangan agar terdapat pemahaman akan HaKI dan tidak terjadi kesenjangan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum HaKI dengan Hukum Persaingan Usaha saling berkaitan, saling melengkapi satu sama lain. Iklim persaingan usaha yang sehat dan didukung oleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam dunia usaha akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang ke depannya. Semakin banyak HaKI dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia maka akan sangat mendukung potensi peningkatan dunia usaha yang lebih baik dalam persaingannya di era pasar bebas. Produk dalam negeri akan dapat bersaing dengan produk luar, sehingga akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Dalam penerapan HaKI di Indonesia tentunya tidak berjalan mulus. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik rezim HaKI dengan karakteristik budaya masyarakat lokal. Karakteristik rezim HaKI bersifat individualistik sedangkan karakteristik masyarakat lokal bersifat komunal. Hal tersebut membuat HKI mengalami kendala dalam penerapannya di Indonesia.

Saran

Ada beberapa solusi sebagai penengah atau perbaikan dalam bidang HaKI untuk dapat menjembatani permasalahan tersebut. Perbaikan-perbaikan pada konsep perlindungan HKI yang ada sekarang perlu dilakukan. Perbaikan tersebut meliputi pembenahan dalam perundang - undangan dan terobosan kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan lokal, pendokumentasian terhadap kekayaan intelektual Indonesia, peran aktif dan saling bersinerginya antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam bidang HKI, perbaikan dalam kelembagaan, membangun budaya hukum bagi masyarakat. Perbaikan tersebut perlu dilakukan dengan komitmen yang kuat untuk memperbaiki segala kelemahan perlindungan HaKI yang ada saat ini.

REFERENSI

- Nia Kurnian, dkk. (2017). *Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Teri Biru Seira dan Kerupuk Ikan Tanimbar sebagai Industri Kreatif Masyarakat di Kota Saumlaki*. PJIH Volume 4 Nomor 3 ISSN 2460-1543 e-ISSN 2442-9325
- Mastur. 2012. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten*. vol.6 nomor 1. *Jurnal ilmiah ilmu hukum QISTI*.
- Nugroho, Sigit. 2015. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean*. ISSN: 1693-766X, Vol. 24, No. 2. *Jurnal penelitian hukum, supremasi hukum*.
- Sofyarto, Karlina. 2018. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*. Vol 20. No.1. *Kanun jurnal ilmu hukum*.